

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tokoh Adat

1. Pengertian Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam masyarakat dimana keberadaan mereka sangat dibutuhkan karena mampu menjadi penghubung antara nilai-nilai tradisional dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.¹²

Menurut pendapat Wiriantimadja (2002:128) tokoh adat dapat dipahami sebagai individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan dalam memengaruhi orang lain. Proses ini secara bertahap mendorong masyarakat untuk menyesuaikan pola pikir dan perilaku mereka setelah menerima wawasan serta cara pandang baru yang diperkenalkan oleh tokoh adat tersebut.¹³

Tokoh adat adalah individu yang menempati posisi atau jabatan tertentu yang memiliki pengaruh dalam mengatur kehidupan masyarakat adat disuatu wilayah. Persn ini menjadikan mereka sebagai elemen penting dalam struktur sosial masyarakat. Hal ini dikarenakan

¹²Anastasia Tahan, Bernardus Seran Kehik, and Medan Yonathan Mael, "PERANAN TOKOH ADAT DALAM MELASTARIKAN KEBUDAYAAN LOKAL DI DESA LAKANMAU," *Jurnal Poros Politik* 3, no. 1 (December 2021): 1–7,

¹³Tahan, Kehik, and Mael.

tokoh adat tidak hanya berfungsi secara structural, tetapi juga memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Tokoh adat merupakan individu yang memiliki pemahaman serta penerapan nilai-nilai normatif dalam kehidupan masyarakat. Ia berperan sebagai pemimpin maupun penasihat dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta budaya lokal, sekaligus menjadi penjaga warisan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat adat, kepemimpinan biasanya berasal dari garis keturunan tokoh-tokoh terdahulu, yang umumnya didominasi oleh laki-laki sesuai dengan standar budaya setempat.

Menurut pandangan Koentjaraningrat, masyarakat adat memiliki sistem sosial yang terstruktur, di mana kepemimpinan dipegang oleh sosok yang memahami adat istiadat secara mendalam serta memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial. Hal ini menegaskan bahwa tokoh adat memiliki posisi strategis dalam membentuk, mengarahkan, serta memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.

Dalam konteks perlawanan terhadap proyek Pembangunan, tokoh adat berperan sebagai penggerak utama. Mereka menjadi orang yang pertama kali menyuarakan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak yang mungkin terjadi. Melalui pengaruh yang dimiliki, tokoh

adat mampu membangun kesadaran masyarakat untuk memahami situasi yang dihadapi.

2. Kedudukan Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan pemimpin yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adat. Kedudukannya diperoleh melalui pengakuan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat, pengalaman, kewibawaan, serta kemampuannya dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat yang berlaku. Berbeda dengan pemimpin formal yang memperoleh kewenangan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, tokoh adat memperoleh legitimasi dari kepercayaan masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki kekuatan moral dan sosial yang dihormati oleh anggota masyarakat.¹⁴

Dalam masyarakat adat, tokoh adat berfungsi sebagai pengayom yang menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan adat istiadat. Tokoh adat memiliki kewenangan untuk memimpin musyawarah adat, menyelesaikan perselisihan, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta mengarahkan masyarakat agar tetap mematuhi norma dan aturan adat. Kedudukan tersebut menjadikan tokoh adat sebagai figur sentral dalam menjaga

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 233-235.

ketertiban, persatuan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.¹⁵

Dalam konteks penelitian ini, kedudukan tokoh adat di Lembang Balla Kecamatan Bittuang terlihat dari kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada tokoh adat untuk memimpin musyawarah, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengarahkan langkah-langkah masyarakat dalam menghadapi rencana proyek geothermal. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat.

3. Fungsi Tokoh Adat

Tokoh adat memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat, tetapi juga mencakup pembinaan kehidupan sosial, penyelesaian konflik, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta pelestarian nilai-nilai budaya. Menurut Soepomo, masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan yang hidup berdasarkan aturan adat yang dijaga dan dipertahankan oleh para pemimpin adat demi menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bersama.¹⁶

¹⁵Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta; Rineka Cipta, 2015), 146-151

¹⁶Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta; Pradnya Paramita, 2003), 7-10

Selain menjaga adat istiadat, tokoh adat juga berfungsi sebagai pemimpin yang memberikan arahan kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Tokoh adat menjadi tempat masyarakat meminta pertimbangan ketika menghadapi konflik maupun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat. Melalui fungsi tersebut, tokoh adat berupaya menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah dan nilai-nilai adat.¹⁷

Dalam penelitian ini, fungsi tokoh adat tercermin melalui keterlibatan aktif mereka dalam memimpin musyawarah, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proyek geothermal, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, serta menjaga persatuan masyarakat dalam mempertahankan tanah adat dan lingkungan hidup. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat tidak hanya berperan sebagai penjaga adat, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam melindungi kepentingan masyarakat adat.

B. Peran Tokoh Adat

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status yang dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono

¹⁷Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi, Edisi KE-16* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 249-252.1

Soekanto, peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki seseorang dalam suatu kelompok sosial. Seseorang dikatakan telah menjalankan perannya apabila ia mampu melaksanakan fungsi, tanggung jawab, serta kewajibannya sesuai dengan harapan masyarakat.¹ Dengan demikian, peran tidak hanya menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat, tetapi juga mencerminkan tindakan nyata yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

Dalam masyarakat adat, tokoh adat memiliki peran yang sangat penting karena menjadi figur yang dipercaya untuk memimpin, mengarahkan, serta menjaga kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku. Peran tokoh adat tidak hanya terbatas pada pelaksanaan upacara adat, tetapi juga mencakup penyelesaian konflik, perlindungan hak-hak masyarakat adat, pelestarian budaya, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah. Oleh karena itu, tokoh adat menjadi salah satu aktor penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di tengah berbagai perubahan sosial dan pembangunan.

Dalam konteks penelitian ini, peran tokoh adat menjadi sangat penting karena masyarakat Balla menghadapi rencana proyek geothermal yang dipandang berpotensi memengaruhi kehidupan sosial, budaya, lingkungan, dan hak ulayat masyarakat adat. Tokoh adat berperan dalam memimpin masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, menyampaikan informasi mengenai proyek geothermal, menjembatani

komunikasi dengan pemerintah, melindungi hak ulayat, serta mempersatukan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Peran-peran tersebut menjadi fokus utama penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tokoh adat menjalankan kepemimpinannya dalam perlawanan masyarakat Balla terhadap proyek geothermal di Lembang Balla Kecamatan Bittuang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji enam peran utama tokoh adat, yaitu: (1) peran sebagai pemimpin, (2) peran sebagai mobilisator, (3) peran sebagai komunikator, (4) peran sebagai mediator, (5) peran sebagai pelindung hak ulayat, dan (6) peran sebagai pemersatu masyarakat. Keenam peran tersebut digunakan sebagai indikator dalam menganalisis hasil penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran tokoh adat dalam perlawanan masyarakat Balla terhadap proyek geothermal.

Adapun peran tokoh adat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Sebagai Pemimpin

Tokoh adat merupakan pemimpin yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat adat karena memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kepemimpinan tokoh adat tidak hanya diwujudkan melalui kewenangan dalam memimpin pelaksanaan adat,

tetapi juga melalui kemampuan mengarahkan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Menurut Stephen P. Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi suatu kelompok agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya menekankan pada posisi seseorang, tetapi juga pada kemampuan memengaruhi, mengarahkan, dan membangun komitmen anggota kelompok.

Sebagai pemimpin masyarakat adat, tokoh adat memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai adat, memimpin musyawarah, menyelesaikan konflik, serta mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.¹⁹ Kepemimpinan tokoh adat dijalankan melalui pendekatan persuasif dengan mengedepankan musyawarah, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat istiadat.²⁰ Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah adat umumnya diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat karena didasarkan pada kesepakatan bersama dan nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat.

¹⁸Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, Edisi ke-16, 2017. 410-412

¹⁹Soepomo *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, 2003, 249-252

²⁰Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, 2015. 146-151

Dalam konteks penelitian ini, peran tokoh adat sebagai pemimpin terlihat dari kemampuannya memimpin masyarakat Balla dalam menyikapi rencana proyek geothermal di Lembang Balla Kecamatan Bittuang. Tokoh adat menjadi pihak yang menginisiasi musyawarah adat untuk membahas dampak proyek terhadap tanah adat, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Melalui musyawarah tersebut, tokoh adat memberikan arahan kepada masyarakat agar setiap tindakan yang dilakukan tetap mengedepankan nilai-nilai adat, persatuan, dan penyampaian aspirasi secara damai.

Selain memimpin proses pengambilan keputusan, tokoh adat juga memberikan teladan kepada masyarakat melalui sikap yang konsisten dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Keteladanan tersebut menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat bersedia mengikuti arahan tokoh adat dalam mempertahankan hak ulayat dan kelestarian lingkungan. Kepemimpinan yang ditunjukkan tokoh adat tidak bersifat otoriter, melainkan mengutamakan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap pendapat masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran tokoh adat sebagai pemimpin memiliki arti yang sangat penting dalam memperkuat perlawanan masyarakat terhadap proyek geothermal. Kepemimpinan tokoh adat tidak hanya tercermin dalam kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga dalam kemampuan membangun

kepercayaan, mengarahkan masyarakat, menjaga persatuan, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berlandaskan nilai-nilai adat. Dengan demikian, tokoh adat menjadi aktor utama yang menentukan arah perjuangan masyarakat Balla dalam mempertahankan hak-hak masyarakat adat.

2. Peran Sebagai Mobilisator

Mobilisator merupakan pihak yang memiliki kemampuan menggerakkan individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks gerakan sosial, seorang mobilisator tidak hanya mengajak masyarakat untuk bertindak, tetapi juga mampu mengorganisasi sumber daya, membangun solidaritas, dan menciptakan kerja sama yang efektif.

Menurut John D. McCarthy dan Mayer N. Zald dalam *Resource Mobilization Theory*, keberhasilan suatu gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam memobilisasi sumber daya, baik sumber daya manusia, organisasi, informasi, maupun dukungan masyarakat.¹ Oleh karena itu, kemampuan mobilisasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu gerakan masyarakat.

Sebagai mobilisator, tokoh adat memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Peran tersebut diwujudkan

melalui penyelenggaraan musyawarah adat, koordinasi dengan masyarakat, pemberian arahan, serta pembangunan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga tanah adat, lingkungan hidup, dan nilai-nilai budaya. Tokoh adat juga berperan membangun kepercayaan masyarakat sehingga setiap tindakan yang dilakukan merupakan hasil kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan norma adat.

Dalam penelitian ini, peran tokoh adat sebagai mobilisator terlihat ketika tokoh adat di Lembang Balla mengajak masyarakat menghadiri musyawarah untuk membahas rencana proyek geothermal. Melalui forum tersebut, tokoh adat menjelaskan kondisi yang dihadapi masyarakat serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan hak ulayat dan kelestarian lingkungan. Tokoh adat juga mengoordinasikan berbagai bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku.

Kemampuan tokoh adat dalam memobilisasi masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penolakan proyek geothermal. Tokoh adat mampu membangun rasa memiliki terhadap tanah adat sehingga masyarakat bersedia bekerja sama dan saling mendukung dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Mobilisasi yang dilakukan tidak didasarkan pada paksaan, melainkan pada kesadaran masyarakat bahwa tanah adat

merupakan warisan leluhur yang harus dijaga untuk keberlangsungan generasi mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tokoh adat memiliki peran yang sangat penting sebagai mobilisator dalam perlawanan masyarakat Balla terhadap proyek geothermal. Melalui kepemimpinannya, tokoh adat mampu menggerakkan masyarakat, membangun solidaritas, mengorganisasi tindakan kolektif, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mempertahankan hak ulayat serta kelestarian lingkungan. Dengan demikian, peran mobilisator yang dijalankan tokoh adat menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat gerakan perlawanan masyarakat terhadap proyek geothermal di Lembang Balla Kecamatan Bittuang.

3. Peran Sebagai Komunikator

Komunikator merupakan individu yang berperan menyampaikan informasi, gagasan, maupun pesan kepada orang lain dengan tujuan membangun pemahaman dan memengaruhi sikap atau tindakan. Dalam kehidupan masyarakat adat, tokoh adat memiliki peran sebagai komunikator yang dipercaya untuk menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Menurut Onong Uchjana Effendy, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang maupun

kelompok.¹ Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu unsur penting dalam kepemimpinan tokoh adat.

Sebagai komunikator, tokoh adat memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Informasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan adat, kebijakan pemerintah, persoalan sosial, maupun berbagai hal yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat adat. Dalam menjalankan perannya, tokoh adat tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan penjelasan, membangun pemahaman bersama, serta mendengarkan pendapat masyarakat melalui musyawarah adat sehingga tercipta komunikasi dua arah yang efektif.

Dalam penelitian ini, peran tokoh adat sebagai komunikator terlihat ketika tokoh adat di Lembang Balla menjelaskan kepada masyarakat mengenai rencana proyek geothermal beserta dampak yang diperkirakan akan ditimbulkan terhadap tanah adat, sumber mata air, lingkungan hidup, serta kehidupan sosial masyarakat. Informasi tersebut disampaikan melalui musyawarah adat dan pertemuan masyarakat sehingga seluruh warga memperoleh pemahaman yang sama sebelum mengambil keputusan bersama mengenai sikap terhadap proyek tersebut.

Komunikasi yang dilakukan tokoh adat juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Melalui penyampaian informasi

yang terbuka dan jujur, masyarakat lebih memahami alasan perlunya mempertahankan hak ulayat serta menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, tokoh adat menjadi penghubung penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan rencana pembangunan. Dengan demikian, komunikasi yang dibangun tokoh adat tidak hanya memperkuat hubungan di dalam masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran tokoh adat sebagai komunikator memiliki kontribusi yang besar dalam perlawanan masyarakat Balla terhadap proyek geothermal. Kemampuan tokoh adat dalam menyampaikan informasi, memberikan pemahaman, membangun kesadaran, dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan persatuan dan tindakan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, peran komunikator yang dijalankan tokoh adat menjadi salah satu unsur penting dalam keberhasilan masyarakat mempertahankan hak-hak adat dan kelestarian lingkungan di Lembang Balla Kecamatan Bittuang.

4. Peran Sebagai Mediator

Mediator merupakan pihak yang berperan sebagai penengah dalam membangun komunikasi dan membantu menyelesaikan perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Dalam masyarakat

adat, tokoh adat memiliki peran sebagai mediator yang menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, pihak swasta, maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap wilayah adat.

Menurut Christopher W. Moore, mediator merupakan suatu proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.²¹ Peran tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat tidak hanya menjaga keharmonisan masyarakat, tetapi juga menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka.

Sebagai mediator, tokoh adat bertanggung jawab menyampaikan aspirasi masyarakat melalui musyawarah, dialog, dan komunikasi dengan pihak luar.²² Tokoh adat berusaha memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat. Selain itu, tokoh adat juga menjaga agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, damai, dan tetap menghormati norma adat serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peran tokoh adat sebagai mediator terlihat ketika tokoh adat di Lembang Balla mewakili masyarakat dalam

²¹Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflict*, 4th, 15-25

²²Ibid. 31-40

menyampaikan penolakan terhadap proyek geothermal kepada pemerintah dan pihak terkait. Tokoh adat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak luar melalui musyawarah, dialog, dan penyampaian aspirasi mengenai kekhawatiran masyarakat terhadap dampak proyek terhadap tanah adat, sumber mata air, lingkungan hidup, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat tidak hanya menjadi pemimpin internal masyarakat, tetapi juga menjadi representasi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran tokoh adat sebagai mediator memiliki arti penting dalam memperkuat perlawanan masyarakat Balla terhadap proyek geothermal. Kemampuan tokoh adat menjembatani komunikasi, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta membangun dialog dengan pihak luar menjadi salah satu faktor yang mendukung perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak ulayat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, peran mediator yang dijalankan tokoh adat merupakan bagian penting dari kepemimpinan adat dalam menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

5. Peran sebagai pelindung hak ulayat

Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah, tanah, hutan, dan sumber daya alam yang

secara turun-temurun dikuasai, dimanfaatkan, dan dijaga untuk kepentingan bersama. Dalam masyarakat adat, tokoh adat memiliki peran penting sebagai pelindung hak ulayat agar tetap terjaga dari berbagai ancaman yang dapat menghilangkan hak-hak masyarakat adat.

Menurut Soepomo, hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur, memanfaatkan, dan melindungi wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.²³ Oleh karena itu, tokoh adat bertanggung jawab memastikan bahwa keberadaan tanah adat tetap terlindungi demi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sebagai pelindung hak ulayat, tokoh adat bertugas menjaga kelestarian tanah adat, hutan, sumber mata air, serta berbagai sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.²⁴ Tokoh adat juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya mempertahankan wilayah adat sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai historis, budaya, dan spiritual. Selain itu, tokoh adat berupaya mencegah berbagai tindakan yang berpotensi merusak lingkungan maupun mengurangi hak masyarakat atas tanah adat.

Dalam penelitian ini, peran tokoh adat sebagai pelindung hak ulayat terlihat ketika tokoh adat bersama masyarakat Balla berupaya mempertahankan tanah adat dari rencana proyek geothermal yang

²³Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, 2003. 52-57

²⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008). 185–190.

dikhawatirkan dapat berdampak terhadap lingkungan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Tokoh adat memimpin musyawarah, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hak ulayat, serta mengajak masyarakat untuk memperjuangkan perlindungan wilayah adat melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan nilai-nilai adat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran tokoh adat sebagai pelindung hak ulayat merupakan bagian penting dari kepemimpinan adat. Melalui peran tersebut, tokoh adat tidak hanya menjaga keberadaan tanah adat, tetapi juga melindungi identitas, budaya, dan kehidupan masyarakat adat. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan terhadap hak ulayat menjadi salah satu bentuk nyata peran tokoh adat dalam perlawanan masyarakat Balla terhadap proyek geothermal di Lembang Balla Kecamatan Bittuang.

6. Peran sebagai pemersatu masyarakat

Tokoh adat memiliki peran penting sebagai pemersatu masyarakat dalam menjaga keharmonisan, solidaritas, dan kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat adat. Sebagai pemimpin yang dihormati, tokoh adat berupaya membangun hubungan yang harmonis antaranggota masyarakat agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

Menurut Emile Durkheim, solidaritas sosial merupakan ikatan yang mempersatukan anggota masyarakat melalui nilai, norma, dan tujuan bersama sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib dan harmonis.²⁵ Oleh karena itu, tokoh adat memiliki tanggung jawab untuk memperkuat solidaritas masyarakat agar tetap bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan.

Sebagai pemersatu masyarakat, tokoh adat mengajak seluruh anggota masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Tokoh adat juga berperan mencegah terjadinya perpecahan melalui musyawarah, dialog, dan penyelesaian konflik secara adat. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati yang telah lama hidup dalam masyarakat adat.²⁶

Dalam penelitian ini, peran tokoh adat sebagai pemersatu masyarakat terlihat ketika tokoh adat berhasil membangun kebersamaan masyarakat Balla dalam menyikapi rencana proyek geothermal. Melalui musyawarah adat dan berbagai pertemuan masyarakat, tokoh adat mengajak masyarakat untuk tetap bersatu dalam mempertahankan tanah adat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperjuangkan hak-hak

²⁵Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, diterjemahkan oleh W. D. Halls (New York: The Free Press, 1984). 60–67.

²⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 105–110.

masyarakat adat. Persatuan tersebut menjadi kekuatan utama yang mendorong masyarakat melakukan perlawanan secara damai, tertib, dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran tokoh adat sebagai pemersatu masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam memperkuat perlawanan masyarakat Balla terhadap proyek geothermal di Lembang Balla Kecamatan Bittuang. Melalui kepemimpinan yang mengedepankan persatuan, musyawarah, dan solidaritas sosial, tokoh adat mampu menjaga kekompakan masyarakat sehingga tujuan bersama untuk melindungi hak ulayat, lingkungan hidup, dan keberlangsungan budaya adat dapat diperjuangkan secara kolektif. Dengan demikian, peran tokoh adat sebagai pemersatu masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan gerakan perlawanan masyarakat adat.

C. *Geothermal*

Energi *geothermal* atau panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang berasal dari panas alami di dalam perut bumi. Panas tersebut terbentuk dari aktivitas geologi seperti peluruhan unsur radioaktif serta panas sisa pembentukan bumi. Energi ini tersimpan dalam bentuk uap, air panas, maupun batuan panas yang berada di bawah permukaan tanah. Pemanfaatan *geothermal* dilakukan dengan cara mengebor lapisan bumi

untuk mengambil uap atau air panas. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator listrik.²⁷

Selain untuk pembangkit listrik, energi panas bumi juga dimanfaatkan secara langsung dalam sektor pertanian, perikanan, dan pemanas ruangan. *Geothermal* termasuk energi terbarukan karena sumber panasnya relatif tidak habis dalam waktu singkat. Selama kondisi geologi bumi masih aktif, panas tersebut akan terus dihasilkan. Hal ini menjadikan *geothermal* sebagai salah satu alternatif penting dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Di Indonesia, potensi *geothermal* sangat besar karena berada di wilayah cincin api pasifik. Banyak gunung berapi aktif yang menjadi sumber panas bumi potensial. Pemanfaatan energi ini terus dikembangkan untuk mendukung kebutuhan energi nasional yang berkelanjutan.

Adapun dampak positif dan negatif proyek *geothermal* yaitu sebagai berikut:

1. Dampak positif

Salah satu dampak positif utama dari *geothermal* adalah ramah lingkungan. Energi ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil seperti batu bara

²⁷Dickson, M.H, & Fneli, M., *Geothermal energy: utilization and Technology*. (London: Earthscan, 2004).

dan minyak bumi. Hal ini membantu mengurangi pencemaran udara dan dampak perubahan iklim.

Geothermal juga merupakan sumber energi yang berkelanjutan. Selama panas bumi masih tersedia, energi ini dapat dimanfaatkan tanpa khawatir akan habis dalam waktu dekat. Berbeda dengan energi fosil yang membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk, *geothermal* dapat diperbarui secara alami.²⁸ Keunggulan lainnya adalah kestabilan produksi energi. *Geothermal* tidak dipengaruhi oleh kondisi cuaca seperti energi matahari atau angin.

Dengan demikian, pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat beroperasi secara konsisten sepanjang waktu. Dampak positif lainnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Pembangunan pembangkit *geothermal* membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan infrastruktur di daerah tersebut. Selain itu, daerah penghasil *geothermal* juga berpotensi berkembang menjadi kawasan industri dan wisata.

Geothermal juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, suatu negara

²⁸World Bank, *Geothermal Handbook* (Washington DC: World Bank, 2012)

dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan energi jangka panjang.²⁹

2. Dampak Negatif

Meskipun memiliki banyak manfaat, *geothermal* juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya adalah kerusakan lahan akibat kegiatan eksplorasi dan pengeboran. Proses ini dapat mengganggu ekosistem dan menyebabkan perubahan pada kondisi tanah. Selain itu, aktivitas *geothermal* dapat menghasilkan emisi gas berbahaya dalam jumlah kecil, seperti hidrogen sulfida.³⁰ Gas ini memiliki bau menyengat dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika terpapar dalam konsentrasi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik dalam operasionalnya. Dampak negatif lainnya adalah risiko pencemaran air tanah. Cairan panas yang mengandung mineral dapat mencemari sumber air jika terjadi kebocoran atau pengelolaan yang tidak tepat. Hal ini dapat memengaruhi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat sekitar.³¹

Geothermal juga berpotensi menyebabkan gempa bumi kecil atau *microseismic*. Aktivitas pengeboran dan injeksi fluida ke dalam bumi

²⁹International Renewable Energy Agency, *Geothermal Power: Technology Brief*. Abu Dhabi IRENA, 2017

³⁰United States Geological Survey, *Induced Earthquakes and Geothermal Energy* (Washington DC: USGS, 2016).

³¹World Health Organization, *Air Quality Guidelines*. Jenewa WHO, 2006

dapat mengubah tekanan di dalam lapisan tanah. Meskipun biasanya tidak berbahaya, fenomena ini tetap perlu diwaspadai.

Berdasarkan uraian mengenai proyek geothermal, dapat dipahami bahwa pemanfaatan energi panas bumi memiliki berbagai manfaat bagi penyediaan energi nasional. Namun, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks penelitian ini, rencana proyek geothermal di Lembang Balla Kecamatan Bittuang menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan dampaknya terhadap tanah adat, sumber mata air, serta kelestarian lingkungan. Kondisi tersebut mendorong munculnya perlawanan masyarakat yang dipimpin oleh tokoh adat melalui berbagai peran, seperti sebagai pemimpin, mobilisator, komunikator, mediator, pelindung hak ulayat, dan pemersatu masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai geothermal dalam penelitian ini berfungsi sebagai konteks untuk memahami peran tokoh adat dalam perlawanan masyarakat terhadap proyek tersebut.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam memengaruhi perilaku individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu organisasi maupun masyarakat,

pemimpin berperan mengarahkan, memotivasi, dan memengaruhi anggota agar mampu bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang telah disepakati.

Menurut Stephen P. Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi suatu kelompok agar bersedia bekerja menuju pencapaian tujuan tertentu.³² Definisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kepercayaan, memberikan arahan, dan memotivasi anggota kelompok.

Robbins menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang efektif harus mampu memberikan pengaruh positif kepada anggota kelompok melalui komunikasi yang baik, pengambilan keputusan yang tepat, serta kemampuan membangun kerja sama.³³ Kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga pada kemampuan pemimpin menciptakan hubungan yang harmonis, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi kelompok. Dengan demikian, kepemimpinan menjadi proses sosial yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

³²Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi* disisi ke-16 (Jakarta: Salemba Empat, 2017). 249.

³³Ibid. 249-260

Dalam masyarakat adat, teori kepemimpinan Robbins dapat digunakan untuk menjelaskan peran tokoh adat sebagai pemimpin yang memperoleh legitimasi dari masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat. Tokoh adat tidak hanya memimpin pelaksanaan adat istiadat, tetapi juga memberikan arahan, membangun kepercayaan, memimpin musyawarah, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kepemimpinan tokoh adat dijalankan melalui pendekatan persuasif dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat sehingga setiap keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori kepemimpinan Stephen P. Robbins digunakan untuk menganalisis bagaimana tokoh adat menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam perlawanan masyarakat Balla terhadap proyek geothermal di Lembang Balla Kecamatan Bittuang. Teori ini membantu menjelaskan kemampuan tokoh adat dalam memengaruhi masyarakat, memimpin musyawarah, mengarahkan tindakan bersama, serta membangun komitmen masyarakat untuk mempertahankan hak ulayat, lingkungan hidup, dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Oleh karena itu, Dalam penelitian ini aspek kepemimpinan yang dianalisis meliputi kemampuan tokoh adat dalam memengaruhi masyarakat, memberikan arahan, mengambil keputusan, membangun

komunikasi, serta menciptakan kerja sama dalam menghadapi persoalan proyek *geothermal*.

2. Teori Perlawanan

Teori perlawanan yang dikemukakan oleh James C. Scott menjelaskan *bahwa* perlawanan merupakan respons masyarakat terhadap kebijakan atau tindakan yang dianggap mengancam kehidupan, hak, maupun kepentingan mereka. Menurut Scott, perlawanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara terbuka (*public resistance*) maupun secara tersembunyi (*hidden resistance*).³⁴ Perlawanan terbuka dilakukan melalui demonstrasi, penyampaian aspirasi, petisi, maupun aksi kolektif lainnya, sedangkan perlawanan tersembunyi diwujudkan melalui penolakan secara tidak langsung, penyebaran informasi, atau bentuk-bentuk tindakan yang tidak bersifat konfrontatif. Dengan demikian, perlawanan merupakan upaya masyarakat untuk mempertahankan hak, identitas, dan keberlangsungan hidup mereka.

James C. Scott juga menjelaskan bahwa perlawanan masyarakat umumnya muncul ketika suatu kebijakan dianggap mengancam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, masyarakat akan membangun solidaritas dan

³⁴James C. Scott, *Senjata Kaum yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani* (Yogyakarta: Insist Press, 2000). 29–35.

melakukan tindakan bersama untuk mempertahankan hak-haknya. Keberhasilan perlawanan dipengaruhi oleh adanya pemimpin yang mampu membangun kesadaran, mengorganisasi masyarakat, dan mengarahkan tindakan kolektif agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.³⁵

Dalam konteks masyarakat adat, teori James C. Scott sangat relevan karena masyarakat adat memiliki hubungan yang erat dengan tanah, hutan, sumber mata air, dan wilayah adat sebagai bagian dari identitas serta keberlangsungan hidup mereka. Ketika wilayah adat dipandang berpotensi terdampak oleh suatu proyek pembangunan, masyarakat adat dapat melakukan berbagai bentuk perlawanan sebagai upaya mempertahankan hak ulayat, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Perlawanan tersebut pada umumnya dipimpin oleh tokoh adat yang memiliki legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori perlawanan James C. Scott digunakan untuk menganalisis perlawanan masyarakat Balla terhadap rencana proyek geothermal di Lembang Balla Kecamatan Bittuang. Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak proyek terhadap tanah adat, sumber mata air, lingkungan hidup, serta keberlangsungan

³⁵James C. Scott, *Dominasi dan Seni Perlawanan: Transkrip-Transkrip Tersembunyi* (Yogyakarta: Insist Press, 2000). 1-19

budaya mendorong masyarakat melakukan berbagai bentuk perlawanan secara kolektif. Dalam proses tersebut, tokoh adat berperan sebagai pemimpin, mobilisator, komunikator, mediator, pelindung hak ulayat, dan pemersatu masyarakat sehingga perlawanan yang dilakukan berlangsung secara terorganisasi dan tetap berlandaskan nilai-nilai adat.